

**DAMPAK KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA TERHADAP  
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI WAKATOBI**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

**NUR FADILLAH**

**E061181314**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**DAMPAK KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA TERHADAP  
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI WAKATOBI**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada*

*Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

**NUR FADILLAH**

**E061181314**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA  
TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA BER-  
KELANJUTAN DI WAKATOBI

N A M A : NUR FADILLAH

N I M : E061181314

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Januari 2024

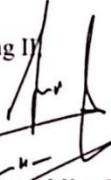


Mengetahui :

Pembimbing I,

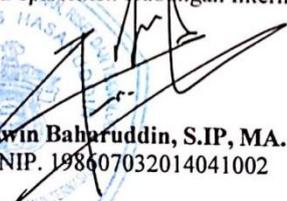
  
Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.  
NIP. 197210282005011002

Pembimbing II

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA  
TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA BER-  
KELANJUTAN DI WAKATOBI

N A M A : NUR FADILLAH

N I M : E061181314

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 22 Desember 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR...

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadillah

NIM : E061181314

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**“Dampak Kerja Sama Ekonomi Swiss-Indonesia terhadap Pengembangan  
Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, dan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
Nur Fadillah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian serta menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul “Dampak Kerja Sama Ekonomi Swiss-Indonesia terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi”, untuk dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin Makassar, guna memperoleh gelar S.IP. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama, dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda **H. Nurla Wally** dan Ibunda tercinta **Asna Wally** yang senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, pelajaran, pengalaman hidup, dan kesabaran dalam mendidik penulis sampai detik ini. Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Phil Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Wakil Dekan, serta seluruh staff.
3. Bapak **H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas pengarahannya kepada penulis.

4. Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang banyak membantu penulis selama perkuliahan, dan Bapak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu **Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama perkuliahan.
6. Saudara-saudaraku tersayang **Aprilya, Sarni, Feby, Annisa, Sri, Dita, Samsul** dan seluruh keponakan yang telah memberikan semangat, bantuan, dan doanya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat terbaikku **Wa Ode Nahda Nurfadilah, Aulia Nurfadilla, Asria Yunisa, Ryan Angriawan, Fikri Febriant Mahardika, Yudi Fauzan Jati, Yulia Firdania**, dan **Sukma Aprilia**, yang telah memberikan dukungan dan kebaikan kepada penulis.
8. Teman-teman **REFORMA HI 18** dan **KKN SULTRA 1** yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.
9. **Semua teman-teman** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata kiranya tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama dalam penerapan serta pengembangan Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 November 2023

Penulis

## ABSTRAK

Nur Fadillah (E061181314) “Dampak Kerja Sama Ekonomi Swiss-Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi”, dibawah bimbingan Ishaq Rahman, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I, dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial bagi Indonesia utamanya di era otonomi daerah saat ini. Pengembangan sektor pariwisata secara langsung akan berdampak signifikan pada masyarakat dan secara tidak langsung akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah juga utamanya menjadi pemasukan devisa negara. Untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di sektor pariwisata, pemerintah Indonesia kemudian aktif menjalin kerja sama internasional dan membuka peluang investasi asing. Salah satu proyek yang dijalankan ialah kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan bilateral dan implementasi kerja sama yang dilakukan antara negara Swiss dan Indonesia dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data melalui studi literatur yang relevan terhadap judul penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui implementasi program kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi dijalankan dengan baik melalui pelaksanaan proyek-proyek bersama, dan kerja sama yang dilakukan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah-daerah terpilih khususnya di Wakatobi.

Kata Kunci: Swiss, Indonesia, Hubungan Bilateral, Kerjasama Ekonomi, Pariwisata Berkelanjutan, INGO, Swisscontact, *State Secretariat for Economic Affair*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## **ABSTRACT**

*Nur Fadillah (E061181314) "The Impact of Swiss-Indonesian Economic Cooperation in Sustainable Tourism Development in Wakatobi", under the guidance of Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as Supervisor I, and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as Supervisor II in Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*The tourism sector is a potential sector for Indonesia, especially in the current era of regional autonomy. The development of the tourism sector will directly have a significant impact on the community and will indirectly contribute to increasing local original income and primarily become the country's foreign exchange income. To boost Indonesia's economic development, especially in the tourism sector, the Indonesian government is actively establishing international cooperation and opening up opportunities for foreign investment. One of the projects being implemented is Swiss-Indonesian economic cooperation in developing sustainable tourism in Wakatobi.*

*This research aims to determine bilateral relations and the implementation of cooperation between Switzerland and Indonesia in realizing sustainable tourism development in Wakatobi. In this research the author used a qualitative method by collecting data through literature studies relevant to the research title. The results of this research show that the implementation of the Swiss-Indonesian economic cooperation program in developing sustainable tourism in Wakatobi was carried out well through the implementation of joint projects, and the cooperation carried out also had a significant impact on the development of sustainable tourism in selected areas, especially in Wakatobi.*

*Keywords: Switzerland, Indonesia, Bilateral Relations, Economic Cooperation, Sustainable Tourism, INGO, Swisscontact, State Secretariat for Economic Affairs, Ministry of Tourism and Creative Economy.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN EVALUASI</b> .....	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VII</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR SKEMA &amp; GAMBAR</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL &amp; GRAFIK</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Kerja Sama Ekonomi Bilateral .....	23
B. <i>International Non Governmental Organization</i> (INGO) .....	29
C. <i>Sustainable Tourism</i> (Pariwisata Berkelanjutan) .....	33
D. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (<i>SUSTAINABLE TOURISM</i>)</b> .....	<b>44</b>
A. Hubungan Bilateral antara Swiss dan Indonesia .....	44
B. Kerja Sama Swiss-Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia .....	47
C. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi .....	52

<b>BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM &amp; DAMPAK KERJA SAMA EKONOMI SWISS-INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (<i>SUSTAINABLE TOURISM</i>) DI WAKATOBI .....</b>	<b>69</b>
A. Implementasi Program Kerja Sama Ekonomi Swiss-Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi .....	78
B. Dampak Kerja Sama Ekonomi Swiss-Indonesia Terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wakatobi .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **DAFTAR SKEMA & GAMBAR**

Skema 1. Kerangka Konsep .....	11
Gambar 1. Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia .....	54
Gambar 2. Peta Wilayah Pariwisata Wakatobi .....	55
Gambar 3. Peta Destinasi Terpilih Proyek WISATA .....	79
Gambar 4. Hasil Pencapaian Proyek WISATA .....	83
Gambar 5. Peta Fokus Area Proyek SUSTOUR .....	85
Gambar 6. Peta Presentase Pengembangan Sektor Pariwisata Indonesia .....	102

## **DAFTAR TABEL & GRAFIK**

Tabel 1. Perbedaan Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Berkelanjutan ...	35
Tabel 2. Daftar Perjanjian Kerja sama Swiss-Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan .....	73
Grafik 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia 2017-2022 .....	86
Grafik 2. Pendapatan Devisa Indonesia dari Sektor Pariwisata 2009-2019 ....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang kaya akan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Didukung dengan jumlah populasi penduduk mencapai 273 juta jiwa, dan letak wilayah yang strategis membentang luas melingkupi 17.000 pulau (Kemendagri). Menjadi potensi besar bagi negara Indonesia dalam pemberdayaan sumber daya yang dimiliki utamanya untuk kepentingan nasional. Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya eksotis yang dimiliki Indonesia adalah melalui pengembangan pariwisata.

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial bagi Indonesia utamanya di era otonomi daerah saat ini. Pengembangan sektor pariwisata secara langsung akan berdampak signifikan pada masyarakat dan secara tidak langsung akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah juga utamanya menjadi pemasukan devisa negara. Berdasarkan analisis dari *World Travel and Tourism Council* (WTTC) 2016, dan *World bank* 2016, sektor industri pariwisata Indonesia menyumbang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pariwisata tercatat menduduki peringkat ke-4 penyumbang devisa negara dengan capaian sebesar 9,3%, dengan pertumbuhan

penerimaan devisa tertinggi sebesar 13%, dengan pengeluaran biaya *marketing* hanya 2% dari proyeksi devisa. Selain itu sektor pariwisata juga berkontribusi sebagai penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, dan dalam 5 tahun lapangan kerja sektor tersebut terus tumbuh sebesar 30% (Suwena, 2017).

Namun dalam pengembangan sektor industri pariwisata di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah utamanya berkaitan dengan ketidakseimbangan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi pada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Barat Indonesia khususnya berfokus pada pembangunan kepariwisataan wilayah Jawa-Bali. Perencanaan dan pembangunan pariwisata di Kawasan Timur masih kurang diperhatikan sementara jika dilihat lebih jauh potensi sumber daya alam khususnya untuk wisata, Kawasan Timur Indonesia lebih memiliki peluang yang besar jika dioptimalkan dengan baik. Kelemahan lain juga terlihat dimana pariwisata Bali lebih dijadikan sebagai tumpuan bagi sektor pariwisata Indonesia (Isdarmanto, 2017).

Untuk menghadapi masalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, pemerintah Indonesia kemudian aktif menjalin kerja sama dan membuka peluang investasi asing. Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 berhasil menggandeng Pemerintah Swiss untuk menjalin kerja sama dalam proyek pengembangan pariwisata Indonesia. Tepatnya saat Presiden Konfederasi Swiss, Doris Leuthard melakukan

kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 6-9 Juli 2010 dalam rangka investasi di Indonesia. Salah satu capaian penting dari kunjungan tersebut, Presiden Swiss membuat komitmen untuk membantu Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Pulau Flores, NTT dengan memberikan bantuan dana investasi sebesar CHF. 4,8 juta atau dinominalkan dalam konversi rupiah sebesar Rp. 87.600. 480.000 (Hermawan, 2021).

Swiss merupakan negara di kawasan Eropa Barat yang dikenal dengan reputasi baik di dunia. Meskipun luas wilayah yang dimiliki hanya 41,285 km dengan populasi 8,670 juta jiwa (data tahun 2020), Swiss dikenal sebagai negara konfederasi yang stabil dalam politik dan pemerintahan, mapan dalam ekonomi, juga memegang posisi yang kuat dalam percaturan dunia internasional. Status Swiss sebagai negara netral dan peran aktifnya dalam membangun hubungan dan kerja sama menjadi kekuatan politik internasional Swiss. Swiss juga dipercaya sebagai mediator dan posisi politiknya diakui memiliki kredibilitas (KBRI, 2018).

Awal mula hubungan diplomatik antara Swiss dan Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1951. Ditandai dengan beberapa kunjungan kenegaraan dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) ke Swiss, serta dukungan yang terus diberikan Pemerintah Swiss kepada Indonesia di berbagai forum multilateral. Bagi Swiss, Indonesia merupakan negara strategis di Asia Tenggara dan masuk sebagai salah satu negara prioritas Swiss yang ditandai peningkatan kesepakatan kerja sama ekonomi dalam investasi dan perdagangan sejak tahun 2009 (KBRI, 2021).

Pemerintah Swiss membentuk *State Secretariat for Economic Affair* (SECO) dibawah Divisi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Swiss. SECO bertanggung jawab dalam mengatur semua permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, penyalur dana investasi, dan pelaksana kerja sama ekonomi Swiss baik dalam lingkup bilateral maupun internasional. Indonesia, Mesir, Ghana, Afrika Selatan, Vietnam, Kolombia, dan Peru adalah negara-negara yang ditetapkan sebagai prioritas program pembangunan SECO sejak tahun 2008 (EAER, 2020).

Sejak Indonesia ditetapkan masuk sebagai salah satu negara prioritas Swiss dalam SECO, Swiss berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, untuk penguatan mitra politik dan ekonomi, juga untuk peningkatan ketahanan dan kesetaraan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Salah satu yang menjadi proyek prioritas dalam kerja sama SECO ini ialah pengembangan pariwisata berkelanjutan Indonesia (*sustainable tourism development in Indonesia/STDI*) (SECO Cooperation, 2021).

Sebagai keberlanjutan dari kerja sama Swiss-Indonesia sebelumnya pada proyek pengembangan pariwisata Indonesia fase I di Flores pada tahun 2010. Menteri Ekonomi Swiss, John Schneider Amman mewakili *State Secretariat for Economic Affair* (SECO) menyepakati penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu terkait kerja sama Swiss-Indonesia dalam pengembangan destinasi wisata.

Penandatanganan *MoU Project Document Phase II* dilakukan di Balaiung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada 28 Oktober 2013 (Prawitasari, 2013). Melalui MoU tersebut Pemerintah Swiss melalui SECO berkomitmen memberikan dana bantuan investasi sebesar 8,970,000 CHF atau sejumlah Rp.163.703.397.000 untuk pengembangan wisata di empat destinasi terpilih dari hasil seleksi 15 destinasi unggulan di Indonesia yang direkomendasi oleh Menparekraf Indonesia yaitu:

- 1) Pulau Flores (Nusa Tenggara Timur);
- 2) Tanjung Puting (Kalimantan Tengah);
- 3) Toraja (Sulawesi Selatan); dan
- 4) Wakatobi (Sulawesi Tenggara).

Kerja sama antara Kemenparekraf Indonesia dengan pemerintah Swiss melalui SECO dibawah *MoU Phase II* menekankan beberapa poin aspek kerja sama diantaranya yaitu:

- a) Aspek kerja sama dengan pemerintah daerah terpilih,
- b) Pemberdayaan sumber daya lokal,
- c) Sinergi dengan tata kelola destinasi pariwisata nasional, serta
- d) Pelibatan institusi pendidikan khususnya institusi dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Antara, 2013)

Implementasi dari kerja sama SECO untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan Indonesia selanjutnya di mandatkan pada Lembaga Pelaksana dan Pengaturan Proyek ini yaitu Swisscontact didukung dengan kerja sama dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait. Tujuan proyek kerja

sama SECO ialah membantu pengembangan industri pariwisata di Kawasan Timur Indonesia untuk menjadi destinasi wisata baru dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar (Dewi, 2019).

Swisscontact merupakan salah satu organisasi non pemerintah atau *International Non Governmental Organization* (INGO) dari Swiss yang berfokus pada pelaksana kerja sama dalam pembangunan internasional yang berkelanjutan khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan ekologi untuk negara-negara berkembang. Swisscontact didirikan sejak tahun 1959 dan terdaftar resmi dibawah hukum negara Swiss. Swisscontact dan SECO memiliki tujuan yang sama untuk mengetaskan kemiskinan dan mendorong peningkatan kehidupan masyarakat melalui kerja sama langsung dengan lembaga daerah dan masyarakat lokal (Swisscontact, 2022).

Di Indonesia dengan adanya perubahan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari tuntutan sistem tersebut kemudian mendorong terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan INGO untuk pengembangan ekonomi lokal (Wulan, 2013).

Wakatobi adalah salah satu wilayah yang terletak di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki potensi besar untuk pengembangan destinasi wisata. Asal penyebutan Wakatobi diambil dari nama pulau-pulau terbesar daerahnya yaitu Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Wakatobi merupakan wilayah Kabupaten, yang terletak di

Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas 19.200 km<sup>2</sup> yang terdiri atas pulau-pulau kecil dengan karakteristik sebagian besar wilayahnya pantai berpasir dengan total panjang pantai sejauh 198,76 km. Didukung dengan karakteristik wilayah berpantai Wakatobi kaya akan sumber daya kelautan. Tercatat bahwa wilayah Wakatobi memiliki 942 spesies ikan, 90.000 terumbu karang, 750 spesies karang dari 850 spesies karang yang ada dunia, dan berhasil tercatat sebagai wilayah dengan karang atol terpanjang di dunia dengan panjang 48 km (Data Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Wakatobi). Destinasi pariwisata unggulan daerah ini ialah Taman Nasional Wakatobi (*Wakatobi National Park*) yang menyajikan destinasi wisata bawah laut. Selain itu perairan Wakatobi sejak tahun 2012 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu cagar biosfir dunia oleh UNESCO (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Pariwisata di Wakatobi memiliki permasalahan yang cukup rumit akibat dari tumpang tindih wilayah antara wilayah kabupaten dan taman nasional. Tantangan terbesar ialah adanya perselisihan peraturan antara otoritas kabupaten dengan taman nasional yang menyebabkan perubahan sistem dalam pengelolaan taman nasional. Disisi lain juga mekanisme penerbitan ijin usaha yang sulit menjadi hambatan besar bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pemberdayaan pariwisata yang ada (Nadjib, 2021).

Swiss melalui SECO mendanai proyek kerja sama pengembangan pariwisata berkelanjutan Indonesia di Wakatobi. Untuk mewujudkan pencapaian yang optimal dalam kerja sama yang dilakukan SECO dibantu Swisscontact dan kerja sama erat dengan Kemenparekraf Indonesia dan juga melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait, kemudian membentuk Proyek WISATA dan Proyek SUSTOUR. WISATA merupakan proyek yang dibuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan, mendorong peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja untuk penduduk setempat pada empat destinasi terpilih Indonesia, Flores, Tanjung Puting, Toraja, dan Wakatobi selama periode 2009-2018. Implementasi hasil dari Proyek WISATA khususnya di wilayah Wakatobi selama delapan tahun, berhasil mendukung pembentukan *Destination Management Organization (DMO) Wakatobi- (Island Working Group) IWG Networks* yang berdampak baik dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan destinasi yang lebih luas dan komprehensif (Swisscontact, 2018).

Kerja sama kemudian dilanjutkan dan difokuskan untuk dua target tujuan destinasi yaitu Flores bagian barat (Labuan Bajo) dan Wakatobi dalam Proyek SUSTOUR (*Sustainable Tourism Destination Development*) untuk periode 2018-2022. Proyek SUSTOUR merupakan bagian dari Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia (SDTI) yang di pimpin oleh SECO bersama Kemenparekraf Indonesia dengan target tujuan utama

untuk mengembangkan perluasan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia (Swisscontact, 2022).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang masalah, penelitian skripsi ini akan berfokus menganalisis dampak kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi. Khususnya fokus mengkaji perspektif dua negara dalam kerja sama beberapa proyek yang disepakati. Salah satunya Proyek SUSTOUR yang di danai Swiss melalui *The State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) bersama INGO Swisscontact sebagai pihak yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek oleh SECO sesuai dengan kesepakatan perjanjian *Project Arrangement 2013* tindak lanjut dari MoU sebelumnya di tahun 2010, juga bersama dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) dan pemerintah daerah terkait yang dijalankan selama periode tahun 2018-2022.

Adapun rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu:

1. Bagaimana Swisscontact mengimplementasikan program kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi?
2. Bagaimana dampak kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Swisscontact mengimplementasikan program kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi.
2. Untuk menganalisis dampak kerja sama ekonomi Swiss-Indonesia terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi.

### **D. Manfaat Penelitian**

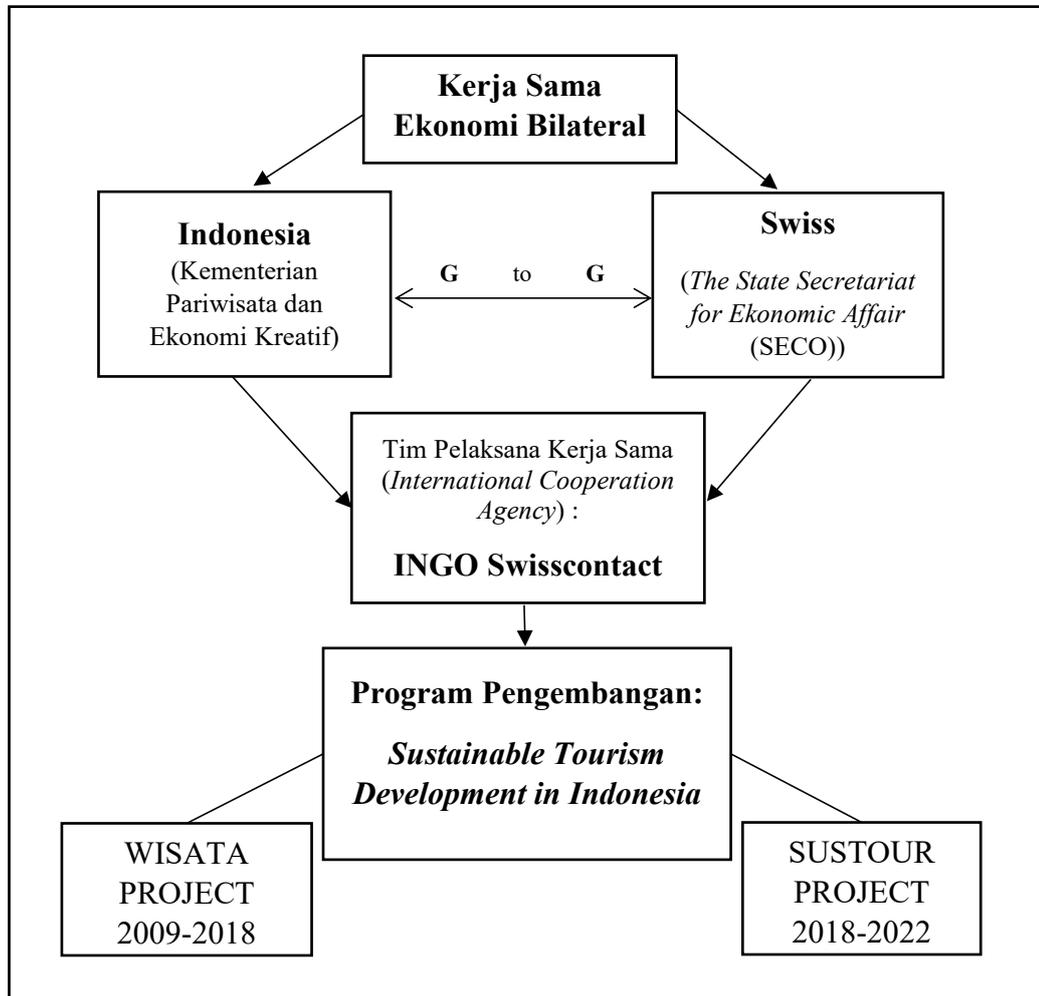
Penulis berharap agar penelitian ini akan bermanfaat untuk:

- 1) Dapat bermanfaat bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap isu-isu global dalam lingkungan masyarakat dunia.
- 2) Dapat memberikan informasi dan mejadi acuan untuk peneliti lainnya terkait isu kontemporer studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam mengkaji dampak kerja sama ekonomi negara terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dunia khususnya di sektor pariwisata.

### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tiga pendekatan konsep dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional yaitu Konsep Kerja Sama Ekonomi Bilateral, Konsep *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan), dan Konsep *International Non Governmental Organization* (INGO).

### Skema 1. Kerangka Konsep:



#### 1. Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Pada dasarnya kerja sama ekonomi bilateral merupakan konsep yang lahir dari pendekatan teori kerja sama internasional. Landasan perspektif dalam teori kerja sama internasional sendiri menekankan bahwa untuk membangun negara dan bangsa yang kuat maka kerja sama merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional merupakan proses yang terbentuk dari berbagai masalah dalam lingkup

nasional, regional, ataupun global yang ada dan kondisi tersebut memerlukan perhatian lebih dari satu negara untuk mendapat penyelesaian bersama. Lebih lanjut Holsti, memandang kerja sama internasional dapat didefinisikan dengan lima intensi, yaitu:

- a. Kerja sama internasional terbentuk dari pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Kerja sama internasional muncul dari pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Kerja sama internasional lahir dari adanya persetujuan atau masalah-masalah antara dua negara atau lebih dan menjadi hasil dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan yang ada.
- d. Hasil dari kerja sama internasional dipandang sebagai aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan negara-negara untuk melaksanakan persetujuan dan kepuasan bersama.
- e. Kerja sama internasional adalah wujud dari transaksi antar negara.

(Suryadi, 2015)

Disisi lain pendekatan konsep kerja sama ekonomi bilateral kemudian terbentuk dengan mempersempit pandangan atas aktor yang memegang peran

utama dalam kerangka kerja sama internasional dalam mencapai kepentingan masing-masing pada bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerja sama ekonomi bilateral dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur aktivitas ekonomi nasional bersama antar dua negara yang menjalin kemitraan (Mulyati, 2020).

Caraiani dan Georgusco (2013) mengartikan kerja sama ekonomi sebagai bentuk kerja sama internasional dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pemanfaatan bersama sumber daya finansial, material, dan teknologi oleh semua mitra. Untuk dapat menjelaskan lebih dalam terkait kerja sama ekonomi, lebih lanjut Caraiani dan Georgusco mengutip penjelasan Petre Tanasie (1974) dan membedakan definisi kerja sama ekonomi dalam tiga dimensi yaitu:

- a. Kerja sama ekonomi internasional dalam arti luas, merupakan pertukaran aktivitas diberbagai bidang dan negara, yang mencakup didalamnya perdagangan internasional, kerja sama produksi, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi internasional, pariwisata, hubungan keuangan, bidang jasa, dan bidang lainnya.
- b. Kerja sama ekonomi internasional dalam arti sempit, diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama, antara dua atau lebih entitas dari berbagai negara, dengan berbagai cara, untuk mencapai tujuan industri, termasuk

didalamnya pertanian, tujuan penelitian, komersial, tujuan wisata, atau hal-hal lainnya.

- c. Kerja sama ekonomi internasional dalam bidang kegiatan yang spesifik.  
(Andruseac and Iulian Hertug, 2015)

Dalam penelitian ini, konsep kerja sama ekonomi bilateral khususnya yang dijelaskan oleh Caraiani dan Georgusco (2013), akan digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis hubungan internasional yang terjalin antara dua negara Swiss dan Indonesia sebagai aktor yang melakukan kerja sama ekonomi khususnya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Indonesia. Sejalan dengan pandangan bahwa, kerja sama ekonomi sebagai bentuk kerja sama internasional dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pemanfaatan bersama sumber daya finansial, material, dan teknologi oleh semua mitra. Kerja sama ekonomi antara Swiss dan Indonesia, menargetkan pengembangan pembangunan pada sektor industri pariwisata, dan sektor tersebut masuk menjadi bagian dari salah satu ciri dari kerja sama ekonomi internasional yang didukung oleh pendapat Petre Tanasie (1974).

## 2. Konsep *International Non Governmental Organization* (INGO)

Organisasi non pemerintah atau yang juga biasa dikenal dalam hubungan internasional dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) adalah suatu organisasi yang memiliki ciri independen yang dibentuk

langsung dari negara ataupun berupa organisasi internasional yang dibentuk oleh negara. NGO umumnya juga dimaknai sebagai suatu kelompok atau organisasi yang melintasi batas-batas nasional dan merujuk pada interaksi trans-nasional tersebut maka sejumlah akademisi hubungan internasional menyebut NGO dengan *International Non-Governmental Organization* (INGO) (Bakry, 2017).

Berdasarkan laporan oleh UNDP dalam '*An Overview of International NGOs In Development Cooperation- Case Study 7*', INGO memegang peran dalam mewakili kehadiran dari sebagian besar negara berkembang, dalam menerima sejumlah besar dana dari 'donor' (negara maju) untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan, serta menjadi aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan dan tata kelola bantuan global. (UNDP, 2023)

Lewis & Kanji menyebut INGO sebagai aktor yang memiliki peran penting dan berkontribusi besar dalam pembangunan internasional, hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan aktif INGO sebagai penyedia berbagai layanan untuk individu dan masyarakat yang lemah ataupun berperan sebagai advokat yang membantu kampanye terkait kebijakan tertentu. Saat ini ada banyak definisi dan pandangan umum terkait INGO, namun ada dua prinsip dasar persamaan pendapat yang disepakati yakni INGO sebagai organisasi tidak dikuasai oleh pemerintah dan tidak berorientasi pada profit. Lewis & Kanji juga mengatakan bahwa pada dasarnya INGO adalah organisasi-

organisasi yang menaruh perhatian besar pada masalah-masalah pembangunan baik itu dalam lingkup sosial, politik, maupun ekonomi karena itu kemudian INGO dianggap sebagai agen pembangunan (*agent of aid*). INGO sebagai agen pembangunan memegang peran dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan salah satu utamanya yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia (Rasyid, 2014).

Konsep INGO dalam penelitian ini kemudian digunakan untuk menganalisis peran aktor INGO khususnya Swisscontact dalam membantu pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang telah disepakati antara Swiss dan Indonesia. Sejalan dengan pemikiran Lewis & Kanji bahwa INGO sebagai *agent of aid* memegang peran dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan salah satu utamanya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi global. Swisscontact sebagai INGO memiliki visi dalam membantu pembangunan ekonomi dunia khususnya pada negara-negara berkembang. Salah satu wujud komitmen untuk mewujudkan visi yang dimiliki ialah dengan keterlibatan Swisscontact sebagai pihak yang membantu pelaksanaan kerja sama ekonomi pemerintah Swiss-Indonesia khususnya terhadap sektor pariwisata di Wakatobi.

Keterlibatan Swisscontact dalam kerja sama pengembangan pembangunan berkelanjutan antara Swiss dan Indonesia di Wakatobi juga sejalan dengan fungsi INGO seperti yang digambarkan oleh UNDP.

Swisscontact memegang peran dalam mewakili kehadiran sebagian besar negara (khususnya negara-negara berkembang) termasuk juga Indonesia, dalam menerima sejumlah besar dana dari ‘donor’ (negara maju (Swiss)) untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan ekonomi, serta menjadi aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan dan tata kelola bantuan global.

### 3. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) pada dasarnya lahir dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Istilah keberlanjutan sendiri telah muncul sejak tahun 1798, dimana saat itu Malthus menyampaikan kekhawatiran pada masalah keterbatasan lahan di Inggris akibat dari ledakan penduduk yang pesat. Perhatian terhadap aspek berkelanjutan kemudian mulai diperhatikan pada 1972 oleh Meadow dengan mempublikasi *The Limit to Growth*, dalam kutipan tersebut Meadow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas oleh ketersediaan sumber daya alam karena itu penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dari pembangunan ekonomi (Arida, 2017).

Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan kemudian mulai berkembang dan diperhatikan masyarakat dunia setelah *World Commission on Environment and Development* (WCED) menerbitkan buku *Our Common Future* pada 1987, yang mendorong lahirnya agenda baru terkait pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan keberlangsungan

lingkungan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan suatu negara di berbagai bidang baik itu dalam sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan yang dilakukan untuk kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan ataupun hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Arida, 2017).

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah aktifitas pariwisata yang dilakukan untuk menciptakan keuntungan ekonomi, sosial, ataupun budaya dan lingkungan alam pada suatu destinasi dan dampak dari kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat lokal (Anjeli, 2020). *Sustainable Tourism* juga dapat dipandang sebagai bagian dari pendekatan pariwisata yang berkembang pesat, didalamnya mengaitkan kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan kondisi lingkungan yang dalam pengembangannya pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata semestinya tidak membawa dampak buruk dan tetap menyatu dengan lingkungan. Dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995, dijelaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan wajib dilandasi pada prinsip keberlanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan harus dapat didukung secara ekologis dan layak secara ekonomi, juga dilakukan dengan adil sesuai etika dan sosial masyarakat (Sunarta, 2017).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip diantaranya yaitu:

- 1) Partisipasi: Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
- 2) Keikutsertaan *stakeholder*: Pembangunan pariwisata harus mengikutsertakan kelompok *stakeholder*, meliputi institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan.
- 3) Kepemilikan lokal: Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat.
- 4) Penggunaan sumber daya berkelanjutan: Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, dan tidak secara berlebihan.
- 5) Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat: Dalam kegiatan pariwisata hak-hak dan tujuan masyarakat harus terwadahi agar tercipta kondisi harmonis antara wisatawan, destinasi dan masyarakat lokal.
- 6) Memperhatikan daya dukung: Pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan kapasitas lahan dan lingkungan.
- 7) Monitor dan evaluasi: Dalam pembangunan pariwisata, monitoring dan evaluasi harus dilakukan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata.
- 8) Akuntabilitas: Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan

perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.

- 9) Pelatihan: Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan profesional.
- 10) Promosi: Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus melakukan promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat (Kurniawati, 2013).

Pendekatan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan menganalisis strategi kerja sama yang dilakukan antara Swiss dan Indonesia khususnya dalam proyek pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi yang didanai oleh Swiss melalui SECO dalam program WISATA dan SUSTOUR, sejalan dengan pendapat yang disampaikan Meadow, bahwa kerja sama pembangunan ekonomi oleh suatu negara harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari pembangunan yang dijalankan. Konsep pariwisata berkelanjutan juga dipakai untuk melihat pendekatan yang diimplementasikan dalam kerja sama antara Swiss dan Indonesia dalam proyek-proyek pembangunan pariwisata Indonesia, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan analisis secara rinci terhadap subjek yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk menguraikan gambaran dari isu yang sedang diteliti khususnya berkaitan dengan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Swiss dalam pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata di Wakatobi.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan selama proses penelitian melalui berbagai sumber buku, jurnal, *e-book*, dokumen, surat kabar, ataupun sumber lain yang menyajikan informasi yang kredibel berkaitan dengan kerja sama ekonomi antara Swiss dan Indonesia dan dampak kerja sama tersebut terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wakatobi.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka (*library research*). Melalui studi pustaka dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis maupun data publikasi pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Swiss dalam pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor pariwisata di Wakatobi.

#### d. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Artinya peneliti akan melakukan pembahasan mendalam terhadap data, isi dan informasi yang telah dikumpulkan dan dijadikan sebagai referensi penelitian. Analisis data kemudian dilakukan dengan menginterpretasikan data dan pendekatan konseptual yang dijadikan landasan pemikiran untuk mencapai hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Konsep kerja sama dalam studi ilmu hubungan internasional merupakan salah satu pendekatan klasik yang sudah sejak lama muncul khususnya setelah Perjanjian Westphalia 1648 disepakati. Perdamaian Westphalia membangun keseimbangan kekuatan atas dasar pembagian kekuasaan dan teritorial kepada penguasa di Eropa saat itu. Perjanjian Westphalia mewujudkan pemberian kedaulatan kepada negara, dan masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan dari tanah di bawah kekuasaannya tanpa campur tangan penguasa lain. Kedaulatan yang diakui dalam perjanjian Westphalia juga tidak mencegah interaksi lintas batas antar negara baik secara diplomatik ataupun komersial (Arcas, 2010).

Interaksi lintas batas antar negara kemudian melahirkan fenomena kerja sama internasional. Terkait fenomena kerja sama internasional, Keohane (1998) berpendapat bahwa:

*“Each actor’s policies (pursued without regard for the interest of others) are regarded by others as hindering the attainment of their goals”. Cooperation take place “[...] when actors adjust their behaviour to the actual or anticipated preferences of others through a process of policy coordination.”* (Minca, 2015)

Keohane memandang kerja sama dimulai dengan situasi saat kebijakan masing-masing aktor (dikejar tanpa memperhatikan kepentingan orang lain) dan dianggap orang lain sebagai penghalang pencapaian tujuan

mereka. Lebih lanjut Keohane menjelaskan bahwa, kerja sama terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari orang lain, melalui proses koordinasi kebijakan.

Pada dasarnya landasan perspektif dalam teori kerja sama internasional sendiri menekankan bahwa untuk membangun negara dan bangsa yang kuat maka kerja sama merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Kerja sama dipandang sebagai cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi masalah kepentingan bersama. K.J Holsti mendefinisikan kerja sama internasional sebagai hasil proses yang terbentuk dari berbagai masalah dalam lingkup nasional, regional, ataupun global yang ada dan kondisi tersebut memerlukan perhatian lebih dari satu negara untuk mendapat penyelesaian bersama (Suryadi, 2015).

Lebih lanjut Holsti, memandang kerja sama internasional dapat didefinisikan dengan lima intensi, yaitu:

- 1) Kerja sama internasional terbentuk dari pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- 2) Kerja sama internasional muncul dari pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

- 3) Kerja sama internasional lahir dari adanya persetujuan atau masalah-masalah antara dua negara atau lebih dan menjadi hasil dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan yang ada.
- 4) Hasil dari kerja sama internasional dipandang sebagai aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan negara-negara untuk melaksanakan persetujuan dan kepuasan bersama.
- 5) Kerja sama internasional adalah wujud dari transaksi antar negara.  
(Suryadi, 2015)

Seiring dengan perkembangan konsep dan hubungan internasional, kerja sama internasional dibagi menjadi empat bentuk kategori yaitu:

- a. Kerja sama multilateral merupakan bentuk kerja sama internasional yang melibatkan banyak aktor, baik negara ataupun organisasi internasional dan tidak terikat oleh batas region maupun wilayah tertentu;
- b. Kerja sama regional merupakan bentuk kerja sama internasional diantara negara-negara yang berada dalam satu region kawasan tertentu;
- c. Kerja sama antar-regional merupakan kerja sama internasional yang melibatkan dua atau lebih kelompok regional negara-negara; dan
- d. Kerja sama bilateral merupakan kerjasama internasional yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. (Mulyati, 2020)

Kerja sama bilateral terbentuk dengan mempersempit pandangan atas aktor yang memegang peran utama dalam kerangka kerja sama internasional, dan terjalin melalui kesepakatan perjanjian kerja sama oleh dua negara. Kerja sama bilateral lebih fokus dalam melihat interaksi dari dua negara untuk mencapai kepentingan bersama dari isu global. Juwondo menjelaskan bahwa hubungan bilateral merupakan interaksi diantara dua aktor (negara) yang dibangun dengan tetap menghormati hak-hak kedua negara atas dasar tujuan menjalin kerja sama pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan dari salah satu negara, serta hubungan bilateral tersebut dapat memberikan nilai tambahan yang menguntungkan untuk dua pihak (Rusmin, 2021).

Manda dan Nicolescu (2014) memandang kerja sama bilateral sebagai hubungan yang terjalin antara dua otoritas (negara), yang masing-masing pihak memiliki tujuan untuk pembangunan lokal bersama, dan otoritas eksekutif menjadi protagonis utama dari hubungan tersebut. Jenis hubungan ini berkaitan dengan pemecahan masalah kepentingan lokal meliputi pelayanan publik lokal, manajemen wilayah, kesehatan, olahraga, dan lainnya, dimana pihak berwenang memiliki fleksibilitas dalam menentukan dan menjalankan proses kerja sama. Alasan yang mendasari kerja sama dan perjanjian bilateral adalah untuk menangani masalah kepentingan bersama yang dilakukan biasanya melalui: pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, konsultasi teknis, pertukaran ahli, penyelenggaraan lokakarya, pertemuan, dan lainnya (Minca, 2015).

Perjanjian bilateral yang disepakati oleh dua negara dalam kerangka kerja sama internasional memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang meliputi berbagai aspek diantaranya, aspek politik, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan, serta aspek ekonomi dan perdagangan. Kerja sama dalam aspek ekonomi oleh dua negara dalam pendekatan hubungan internasional juga dikenal dengan fenomena kerja sama ekonomi bilateral (*bilateral economic cooperation*). Kerja sama ekonomi bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara secara bersama-sama dengan tujuan agar dapat saling bekerja sama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk menunjang peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional (Mulyati, 2020).

Caraiani dan Georgusco (2013) mengartikan kerja sama ekonomi internasional sebagai salah satu bentuk kerja sama internasional yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pemanfaatan bersama sumber daya finansial, material, dan teknologi oleh semua mitra. Lebih lanjut Caraiani dan Georgusco untuk dapat menjelaskan lebih dalam terkait kerja sama ekonomi mengutip penjelasan Petre Tanasie (1974) dan membedakan definisi kerja sama ekonomi dalam tiga dimensi yaitu:

- a. Kerja sama ekonomi internasional dalam arti luas, merupakan pertukaran aktivitas diberbagai bidang dan negara, yang mencakup didalamnya perdagangan internasional, kerja sama produksi, kerja sama ilmu

pengetahuan dan teknologi, transportasi internasional, pariwisata, hubungan keuangan, bidang jasa, dan bidang lainnya.

b. Kerja sama ekonomi internasional dalam arti sempit, diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama, antara dua atau lebih entitas dari berbagai negara, dengan berbagai cara, dengan tujuan untuk mencapai tujuan industri, termasuk didalamnya pertanian, tujuan penelitian, komersial, tujuan wisata, atau hal-hal lainnya.

c. Kerja sama ekonomi internasional dalam bidang kegiatan yang spesifik.  
(Andruseac and Iulian Hertug, 2015)

Pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional dibawah kerangka kerja sama bilateral oleh dua negara dilakukan untuk tujuan:

- a. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bersama akan barang/jasa.
- b. Memperluas pasar hasil produksi dan peningkatan produktivitas barang/jasa yang dimiliki guna memajukan perdagangan dunia.
- c. Memperluas lapangan kerja.
- d. Menambah devisa negara.
- e. Mendistribusikan manfaat sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.
- f. Mengurangi ketimpangan antara Negara maju dan Negara berkembang.
- g. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bangsa-bangsa dunia. (Mulyati, 2020)

## **B. *International Non Governmental Organization (INGO)***

Dalam dunia internasional, terdapat dua bentuk organisasi internasional yaitu *Inter-Governmental Organization* yang disingkat dengan IGO dan *International Non-Governmental Organization* yang disingkat dengan INGO. Organisasi internasional sendiri, menurut Gurtner (2017) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi formal yang keanggotaannya terdiri dari lebih dari satu negara yang terbentuk untuk tujuan yang sifatnya lebih spesifik (Yolanda dkk, 2020).

*Non-Governmental Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki ciri independen yang dibentuk langsung dari negara ataupun berupa organisasi internasional yang dibentuk oleh negara. NGO umumnya juga dimaknai sebagai suatu kelompok atau organisasi yang melintasi batas-batas nasional. Merujuk pada interaksi transnasional tersebut maka, sejumlah akademisi hubungan internasional menyebut NGO dengan *International Non-Governmental Organization* (INGO) (Bakry, 2017).

Bob Reinalda (2009) menjelaskan bahwa melihat dari sejarah, INGO dan IGO memiliki tiga karakteristik yang sama yaitu:

- a) Berdasarkan pada konvenannya (teks yang menggambarkan susunan desain dan penetapan tujuan organisasi yang dibuat oleh pendirinya);
- b) Memiliki struktur sekretaris yang tetap;

- c) Keanggotaannya terbentuk lebih dari satu negara. Yang membedakan antara IGO dengan INGO adalah pada siapa pendirinya. IGO didirikan oleh pemerintah dan INGO dibentuk oleh warga negara yang aktif di ranah nasional dan internasional. (Yolanda dkk, 2020)

Willets (2002) secara spesifik menjelaskan bahwa prinsip yang membedakan antara INGO dengan bentuk organisasi internasional lainnya, INGO didefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang bertindak secara bersama terus-menerus dengan tujuan yang sama secara independen dan sukarela, dengan tidak dimaksudkan untuk mengejar kepentingan jabatan pemerintah, tidak untuk menghasilkan uang, ataupun tidak untuk melakukan kegiatan ilegal. INGO memiliki tiga ciri khusus yaitu:

- a. Independen dari kendali langsung pemerintah manapun, serta tidak dibentuk untuk partai politik/kepentingan politik.
- b. Penghasilan bersifat nirlaba, artinya lembaga atau organisasi yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak berorientasi pada profit/keuntungan.
- c. Non-kriminal dan tidak untuk tujuan ilegal/kekerasan. (Guedes, 2016)

*United Nations Development Programme* (UNDP) memberikan gambaran umum untuk mendefinisikan INGO sebagai:

*“INGOs represent a major presence in many developing countries, receive substantial sums from ‘donors’ to carry out humanitarian assistance and development work, and are an increasing influential actor in policy processes and in the global governance of aid”.* (UNDP, 2023)

Berdasarkan laporan oleh UNDP dalam ‘*An Overview of International NGOs In Development Cooperation- Case Study 7*’, INGO memegang peran dalam mewakili kehadiran dari sebagian besar negara (khususnya negara-negara berkembang), dalam menerima sejumlah besar dana dari ‘donor’ (negara maju) untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan, serta menjadi aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan dan tata kelola bantuan global.

INGO telah muncul sebagai aktor penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dunia. Pertama, di tingkat nasional, INGO mengambil peran penting dalam mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di negara tertentu di mana mereka beroperasi melalui upaya yang lebih besar untuk memberikan bantuan bencana, memberikan layanan sosial yang berkelanjutan, membangun kapasitas lokal untuk swadaya, mempromosikan pemerintahan sendiri, dan meningkatkan pengaruh politik dan kebijakan dari populasi yang terpinggirkan. Kedua, di tingkat internasional, INGO memiliki peran penting dalam menciptakan *international civil society*, yang mendorong pengaruh yang lebih besar pada INGO dalam memegang fungsi pengawasan yang lebih ketat dan tuntutan akuntabilitas yang lebih tajam. Para donor menuntut agar INGO bertanggung jawab atas integritas, efisiensi, dan dampak program yang didanai. Penerima manfaat menekan agar INGO menjalankan tujuan mereka tentang mendorong pembangunan yang dapat berdaya secara lokal dibandingkan prioritas keuntungan. Sedangkan staf mengharapkan INGO untuk memenuhi tujuan tinggi yang menarik komitmen

mereka pada perusahaan. INGO dituntut untuk bertanggung jawab memenuhi janji yang telah disepakati dalam kemitraan dibuat (Brown dkk, 2001).

Berdasarkan buku '*Globalizing Social Justice- The Role of Non governmental Organizations in Bringing about Social Change*', Jeff Atkinson dan Martin Scurrah (2009) membatasi istilah NGO sebagai organisasi yang secara eksplisit memiliki agenda keadilan sosial, yang perhatian utamanya adalah perbaikan kehidupan orang miskin, pemajuan hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan. Tujuan dari NGO biasanya didasarkan untuk menyediakan layanan dan/atau melakukan advokasi untuk mempromosikan penyebab tertentu atau membawa perubahan tertentu. Lebih lanjut, Jeff Atkinson dan Martin Scurrah menjelaskan Organisasi Internasional Non-Pemerintah INGO sebagai NGO berupa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berbasis di satu negara tetapi memiliki sebagian besar operasinya di negara lain khususnya untuk tujuan membantu pembangunan di negara-negara berkembang (Atkinson, 2009).

Lewis & Kanji menyebut INGO sebagai aktor yang memiliki peran penting dan berkontribusi besar dalam pembangunan internasional, hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan aktif INGO sebagai penyedia berbagai layanan untuk individu dan masyarakat yang lemah ataupun berperan sebagai advokat yang membantu kampanye terkait kebijakan tertentu. Saat ini ada banyak definisi dan pandangan umum terkait INGO, namun ada dua prinsip dasar persamaan pendapat yang disepakati yakni INGO sebagai organisasi

tidak dikuasai oleh pemerintah dan tidak berorientasi pada profit. Lewis & Kanji juga mengatakan bahwa pada dasarnya INGO adalah organisasi-organisasi yang menaruh perhatian besar pada masalah-masalah pembangunan baik itu dalam lingkup sosial, politik, maupun ekonomi karena itu kemudian INGO dianggap sebagai agen pembangunan (*agent of aid*). INGO sebagai agen pembangunan memegang peran dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan salah satu utamanya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi global (Rasyid, 2014).

### C. *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan)

*Sustainable tourism* atau dikenal juga dengan pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang berkembang seiring dengan semakin meluasnya pemikiran terkait *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Perspektif pembangunan berkelanjutan mulai banyak menarik perhatian dan dikenal masyarakat dunia setelah *Brundland Report* dengan judul '*Our Common Future*' diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1987. WCED menjelaskan bahwa:

*“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs.” (United Nation, 1987)*

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan suatu negara di berbagai bidang baik itu dalam sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan yang dilakukan untuk kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kemampuan ataupun hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri (*United Nation, 1987*).

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, WTO menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dari masyarakat dunia dan mengedepankan nilai-nilai yang mencakup:

- (1) *Ecological sustainability*: Berkelanjutan secara ekologi, artinya bahwa pembangunan yang dilakukan tidak memberikan efek negatif bagi ekosistem setempat;
- (2) *Social and cultural sustainability*: Berkelanjutan secara sosial dan kultural, artinya bahwa pembangunan dilakukan tanpa menimbulkan konflik sosial dan mampu beradaptasi dengan budaya setempat.
- (3) *Economic sustainability*: Berkelanjutan secara ekonomi, artinya bahwa pembangunan yang dilakukan berkontribusi memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwena, 2017).

Sebelum perspektif tentang pariwisata berkelanjutan diperkenalkan dan mendapat perhatian masyarakat dunia, pembangunan pariwisata awalnya masih bersifat konvensional. Pariwisata bersifat ambivalen, sebab di satu sisi dapat memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi namun di sisi lainnya juga berdampak negatif terhadap peningkatan degradasi lingkungan dan hilangnya identitas lokal (UNWTO, 1995).

Fokus pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh kebanyakan negara pada awalnya lebih condong dilakukan untuk kebermanfaatan ekonomi, sementara nilai-nilai kelestarian lingkungan, adat, dan kontribusi masyarakat masih kurang diperhatikan. Setelah urgensi penerapan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan mulai dibicarakan dan diperhatikan oleh masyarakat dunia. Dasar pemikiran dan prinsip pembangunan berkelanjutan kemudian mulai berkembang dan di adopsi pada bidang pariwisata.

Dalam buku ‘Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata’ mengutip pendapat Soekadijo (1996), memandang definisi pariwisata secara sempit sebagai gejala yang kompleks dalam masyarakat, yang dalam kegiatannya melibatkan instrumen-instrumen mencakup hotel, objek wisata, souvenir, pramuwisata, angkutan wisata, biro perjalanan wisata, rumah makan dan banyak lainnya. Sedangkan Prof. Salah Wahab, menggambarkan pariwisata sebagai suatu aktifitas manusia yang secara sadar dilakukan yang dalam kegiatannya melibatkan pelayanan (wisata) dalam suatu negara maupun di luar negeri, juga meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain di daerah tertentu (wisatawan), ataupun antara suatu negara atau benua untuk sementara waktu untuk tujuan mencari kepuasan yang beraneka ragam (Suwena, 2017).

**Tabel 1. Perbedaan Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Berkelanjutan:**

No.	Pariwisata Konvensional	Pariwisata Berkelanjutan
1.	Memiliki satu tujuan: profit / keuntungan	Direncanakan dengan tiga tujuan: keuntungan, lingkungan, dan masyarakat
2.	Seringkali tidak direncanakan sebelumnya; “terjadi begitu saja”	Biasanya direncanakan terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3.	Berorientasi turis	Berorientasi lokal
4.	Dikendalikan oleh pihak luar	Dikuasai secara lokal, setidaknya sebagian

5.	Fokus pada hiburan bagi wisatawan	Fokus pada pengalaman pendidikan
6.	Konservasi bukan prioritas	Konservasi sumber daya alam menjadi prioritas
7.	Komunitas bukan prioritas	Penghargaan terhadap budaya lokal menjadi prioritas
8.	Banyak pendapatan masuk ke operator luar & investor	Lebih banyak pendapatan tetap dengan masyarakat lokal dan MPA ( <i>Marine Protected Area</i> / kawasan perlindungan laut)

(Sumber : *Sustainable Tourism Concept Modul 3*)

Aktivitas pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua dasar yang menjadi landasan dari konsep pariwisata berkelanjutan. Dalam deklarasi Piagam Pariwisata Berkelanjutan (*Charter for Sustainable Tourism*) yang diterbitkan oleh *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* tahun 1995, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah proses yang memadukan pengelolaan sumber daya global termasuk didalamnya kekayaan alam, budaya, ataupun kawasan lindung untuk dilestarikan guna memastikan kelangsungan hidup masyarakat global. Sebagai alat pembangunan yang kuat untuk suatu negara, aktivitas pariwisata harus didasarkan pada penerapan strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti harus: dapat mempertimbangkan aspek ekologis dalam jangka panjang, layak secara ekonomi, etis, dan bertanggung jawab pada nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat lokal (UNWTO,1995).

Karena itu pariwisata berkelanjutan juga dipandang sebagai bagian dari pendekatan pariwisata yang berkembang dengan pemikiran baru. Yang didalamnya mengaitkan kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan kondisi

lingkungan yang dalam pengembangannya pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata semestinya tidak membawa dampak buruk dan tetap menyatu dengan lingkungan (Sunarta, 2017).

*World Conservation Union* (1996) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagai:

*“Environmentally responsible travel and visitation to natural areas, in order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features, both past and present) in a way that promotes conservation, has a low visitor impact, and provides for beneficially active socio-economic involvement of local peoples”.* (*World Conservation Union, 1996*)

Dapat diartikan bahwa pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai aktivitas perjalanan dan kunjungan ke suatu kawasan alami (destinasi wisata) yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan dilakukan untuk tujuan menikmati dan menghargai alam (dan fitur budaya apa pun yang menyertainya, baik dulu maupun sekarang) dengan cara yang mempromosikan konservasi, memiliki dampak pengunjung yang rendah, dan menyediakan keterlibatan sosial-ekonomi aktif yang bermanfaat masyarakat setempat (*World Conservation Union, 1996*)

Karena lahir dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) juga memegang tiga komponen dasar yang sama yang dijadikan landasan pemikiran yang dikenal dengan ‘*triple bottom line*’, yaitu:

- 1) *Ecological sustainability*: Secara lingkungan, kegiatan berdampak rendah terhadap kerusakan sumber daya alam, khususnya di kawasan

lindung daerah, dan idealnya mencoba memberi manfaat bagi lingkungan.

- 2) *Social and cultural sustainability*: Secara sosial dan budaya, kegiatan tersebut tidak merugikan dan menghormati struktur sosial atau budaya masyarakat setempat. Aktivitas juga harus melibatkan pemangku kepentingan semua golongan (individu, komunitas, operator tur, lembaga pemerintah) dalam semua tahapan perencanaan, pengembangan, dan pemantauan, dan mendidik para pemangku kepentingan tentang peran mereka.
- 3) *Economic sustainability*: Secara ekonomi, kegiatan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangkitan pendapatan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat lokal dan sebanyak mungkin pemangku kepentingan lainnya. (Bien A., 2004)

UNWTO menekankan empat poin kunci yang menjadi acuan dan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, diantaranya yaitu:

- 1) Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
- 2) Menghormati keaslian sosial budaya tuan rumah (masyarakat setempat), melestarikan budaya yang dibangun, sebagai warisan hidup mereka dan nilai-nilai tradisional, serta berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya.

- 3) Memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan kesempatan memperoleh pendapatan dan sosial layanan kepada masyarakat tuan rumah (masyarakat setempat), dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
- 4) Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memastikan pengalaman yang bermakna kepada para wisatawan, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan (UNWTO, 2013).

Untuk memenuhi pemahaman umum secara global tentang pariwisata berkelanjutan, *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* pada tahun 2012 memperkenalkan dalam *GSTC Destination Level Criteria*. GSTC menekankan bahwa destinasi harus mengambil pendekatan interdisipliner, holistik, dan integratif utamanya mencakup empat tujuan diantaranya, yaitu:

- a) Menunjukkan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang meminimalkan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan;
- b) Memaksimalkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat tuan rumah;
- c) Memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, pengunjung, dan warisan budaya yang ada;
- d) Memaksimalkan manfaat bagi lingkungan. (Bricker, 2017)

Jika disimpulkan dan dilihat secara spesifik pengembangan pariwisata berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip diantaranya yaitu:

- a) Partisipasi: Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
- b) Keikutsertaan *stakeholder*: Pembangunan pariwisata harus mengikutsertakan kelompok *stakeholder*, meliputi institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan.
- c) Kepemilikan lokal: Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat.
- d) Penggunaan sumber daya berkelanjutan: Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, dan tidak secara berlebihan.
- e) Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat: Dalam kegiatan pariwisata hak-hak dan tujuan masyarakat harus terwadahi agar tercipta kondisi harmonis antara wisatawan, destinasi dan masyarakat lokal.
- f) Memperhatikan daya dukung: Pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan kapasitas lahan dan lingkungan.
- g) Monitor dan evaluasi: Dalam pembangunan pariwisata, monitoring dan evaluasi harus dilakukan mencakup penyusunan pedoman,

evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata.

- h) Akuntabilitas: Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.
- i) Pelatihan: Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan profesional.
- j) Promosi: Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus melakukan promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat (Kurniawati, 2013).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan untuk melihat tolak ukur perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Skripsi terdahulu yang ditulis oleh Panji Setya Depitra (2015) dengan judul “Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Swiss Melalui Program *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO) Tahun 2009-2013”, penelitian skripsi tersebut fokus membahas terkait kerja sama kemitraan ekonomi

Indonesia dan Swiss melalui program SECO dalam pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan tiga perspektif pemikiran yaitu interdependensi, kerja sama bilateral, dan bantuan luar negeri.

Penelitian yang ditulis oleh Dewi Ratna Sari (2017) dengan judul “Kerjasama Swiss dan Indonesia dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Wakatobi”, yang fokus melihat bagaimana prospek kerja sama antara negara Swiss dan Indonesia dalam pengembangan industri pariwisata di Wakatobi, dengan menggunakan analisis tiga konsep dasar yaitu konsep ekowisata, konsep kerja sama bilateral, dan konsep pengembangan pariwisata.

Skripsi yang ditulis oleh Ainun Jaria (2022), dengan judul penelitian “Kerjasama Indonesia-Swiss dalam Pengembangan Industri Pariwisata di Wakatobi Sebagai 10 Bali Baru Indonesia”, yang fokus membahas prospek dan hasil dari kerja sama Indonesia-Swiss dalam pengembangan industri pariwisata di Wakatobi, dengan menggunakan pendekatan perspektif kerja sama internasional, kepentingan nasional, perjanjian internasional, serta konsep pengembangan pariwisata.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya terlihat bahwa terdapat kesamaan fokus penelitian, topik, dan konsep dengan penelitian yang akan dilakukan. Terlepas dari adanya kesamaan topik penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang kemudian akan mejadi perbandingan pembeda dalam penelitian ini ialah, pertama fokus penelitian yang akan melihat pada implementasi strategi dan dampak dari kerja sama Swiss-Indonesia terhadap pengembangan pariwisata

berkelanjutan di Wakatobi khususnya dalam program SUSTOUR hingga tahun 2021. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih fokus melihat kerja sama antara Swiss dan Indonesia, prospek kerja sama yang dilakukan dalam pengembangan industri pariwisata di Wakatobi. Namun, dalam penelitian yang akan dilakukan ini, akan secara spesifik menganalisis kerja sama Swiss-Indonesia khususnya terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Wakatobi.

Kedua, antara kerangka konsep pemikiran yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu dengan kerangka konsep yang akan digunakan saat ini terdapat beberapa perbedaan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep kerja sama ekonomi bilateral dari Caraianni dan Georgusco dalam menganalisis kerja sama antara dua aktor negara Swiss dan Indonesia. Disamping itu, konsep INGO juga digunakan untuk melihat Swisscontact sebagai *agent of aid* atau agen pembangunan sejalan dengan pemikiran dari Lewis & Kanji dan UNDP. Selain itu juga pendekatan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) untuk menganalisis implementasi kerja sama yang terjalin antara Swiss dan Indonesia sejalan dengan nilai dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga konsep tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai kebaruan topik dibandingkan dengan penelitian terdahulu.